

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

(bapenda.semarangkota.go.id-12/03/2020-18:34)

Kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda No. 148 Komplek Balaikota Gedung C merupakan dinas tempat dilaksanakannya Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah Kota Semarang bersumber dari alokasi pajak daerah yang dibayar setiap tahun oleh penduduk yang bertempat tinggal di Kota Semarang. Nama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dibentuk kembali pada tahun 2016 sesuai dengan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sebelumnya kantor dinas ini bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (DPKAD). Alasan perubahan nama tersebut untuk memperinci tugas serta fungsi dari lembaga pemerintahan agar berfokus untuk menumbuhkan pajak daerah menjadi lebih baik.

Dalam penelitian ini sendiri, fokus penulis adalah membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang dalam hal untuk membangun kontribusi atas PBB membagi menjadi empat Pos Pelayanan yaitu :

1. Pos Pelayanan PBB Wilayah I

Beralamat di Jl. Kangguru Raya No. 3, meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Genuk

- b. Kecamatan Gayamsari
- c. Kecamatan Semarang Timur
- d. Kecamatan Pedurungan

2. Pos Pelayanan PBB Wilayah II

Beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No. 24, meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Semarang Tengah
- b. Kecamatan Semarang Utara
- c. Kecamatan Gajahmungkur
- d. Kecamatan Semarang Selatan

3. Pos Pelayanan PBB Wilayah III

Beralamat di Jl. Puspowarno Raya No. 13, meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Semarang Barat

b. Kecamatan Ngaliyan

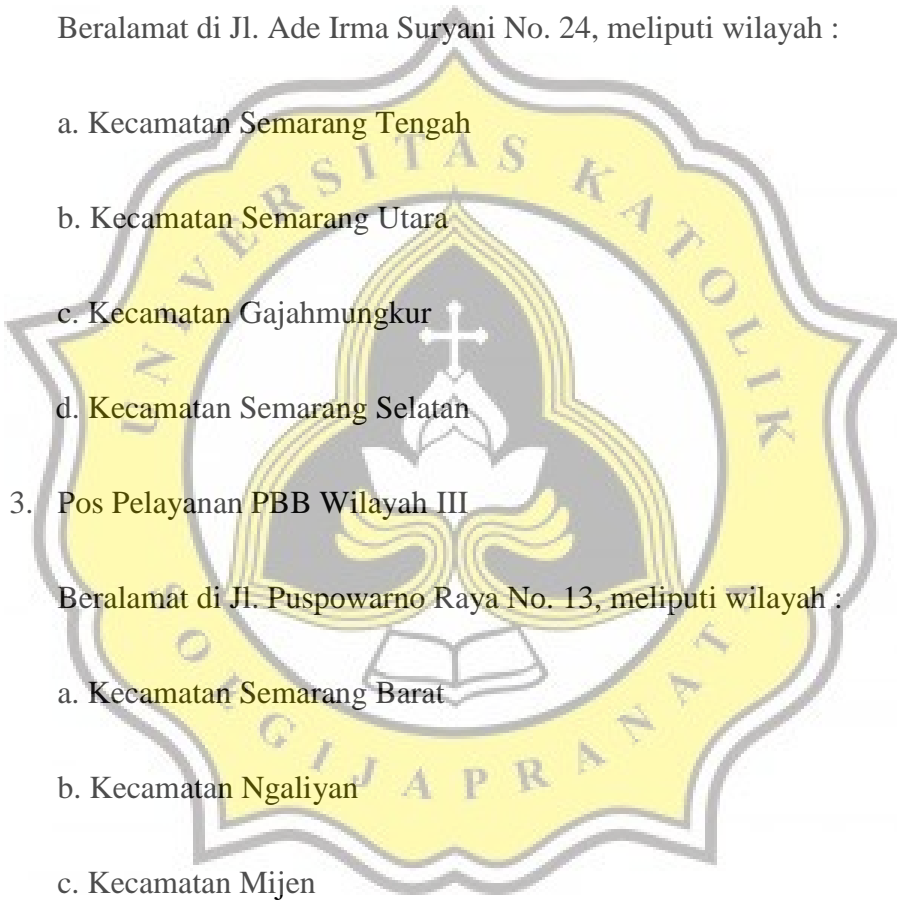
c. Kecamatan Mijen

d. Kecamatan Tugu

4. Pos Pelayanan PBB Wilayah IV

Beralamat di Jl. Prof. Dr. Sudharto No. 116, meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Tembalang



- b. Kecamatan Gunungpati
- c. Kecamatan Banyumanik
- d. Kecamatan Candisari

3.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

(Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2018)

- Visi

“Terwujudnya Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera”

- Misi

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, meningkatkan fasilitas pelayanan publik, serta menjunjung supremasi hukum yang tinggi.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

3.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

(Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2018)

Susunan organisasi dan tata kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun

2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota

Semarang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah I , terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I
4. Bidang Pajak Daerah II , terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II
5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perimbangan
 - b. Sub Bidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Retribusi

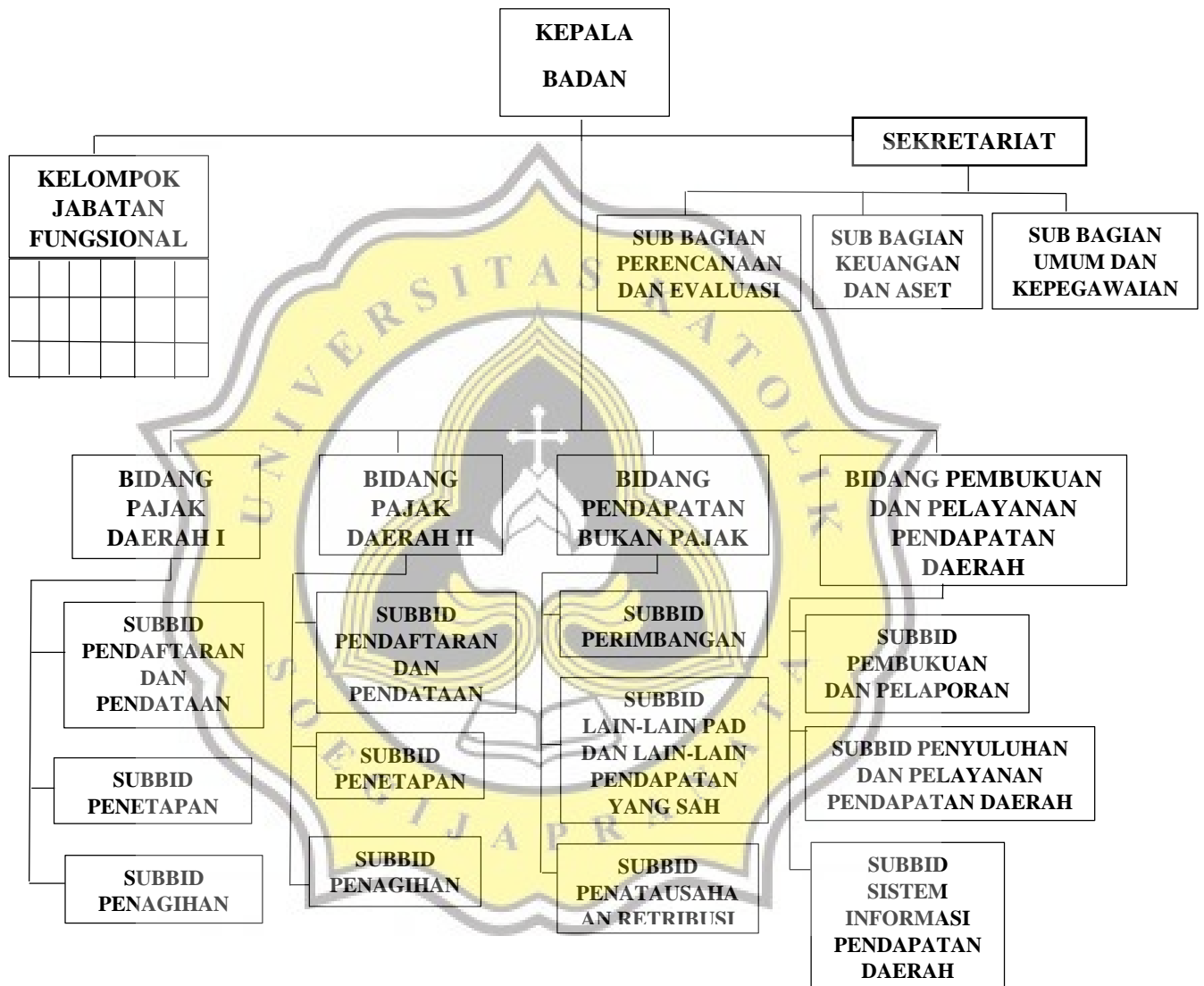
6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



3.4 Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Gambar 3.1

BAGAN ORGANISASI BAPENDA KOTA SEMARANG



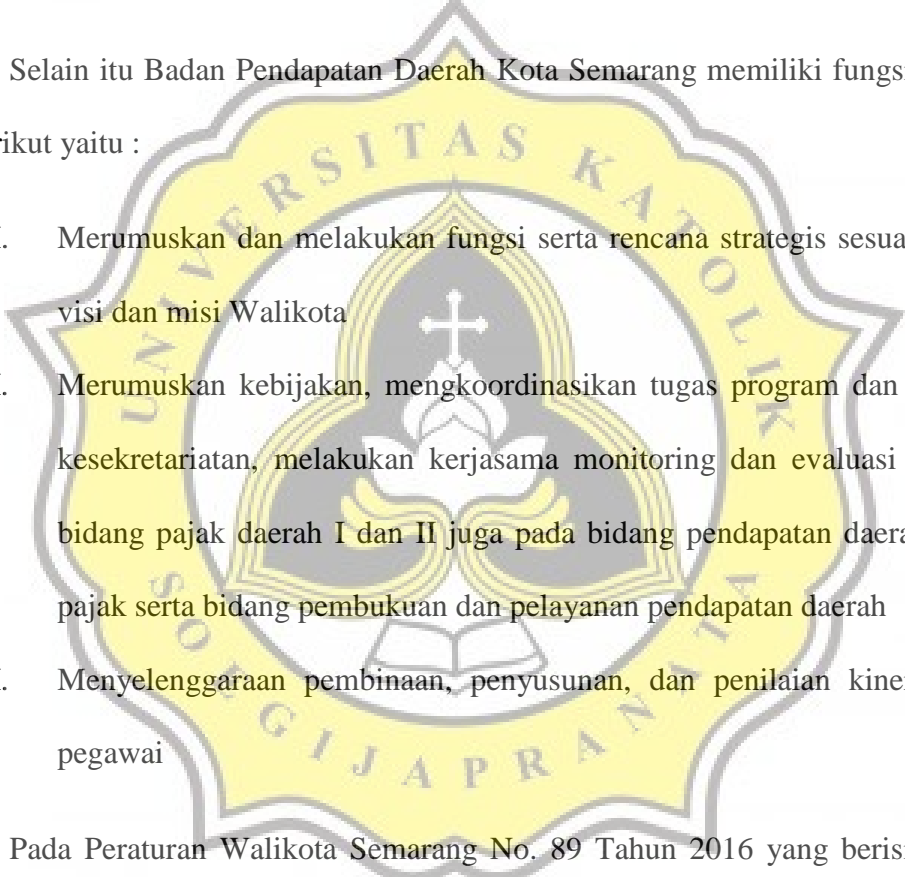
Sumber : Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2018

3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

(Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2018)

Tugas pokok yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yaitu “Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah”

Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut yaitu :

- 
- I. Merumuskan dan melakukan fungsi serta rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
 - II. Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan tugas program dan kegiatan kesekretariatan, melakukan kerjasama monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pajak daerah I dan II juga pada bidang pendapatan daerah bukan pajak serta bidang pembukuan dan pelayanan pendapatan daerah
 - III. Menyelenggaraan pembinaan, penyusunan, dan penilaian kinerja kerja pegawai

Pada Peraturan Walikota Semarang No. 89 Tahun 2016 yang berisi tentang “Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi” dapat dijabarkan yaitu :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, memimpin, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi serta mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, bidang pajak daerah I dan II, bidang pendapatan daerah bukan pajak dan bidang pembukuan dan pelayanan pendapatan daerah.

Adapun fungsi sekretariat meliputi :

- A. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- B. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan;
- C. Menjalankan kegiatan koordinasi, verifikasi penyusunan rencana strategis, kerja dan kinerja tahunan.

Subbagian Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan dan Aset;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan rencana dan kebijakan anggaran serta pengelolaan teknis data dan informasi;
- b) membagi dan membimbing tugas bawahan dan melakukan pemeriksaan.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah beserta laporan keuangan;

b) melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, kearsipan, keprotokolan dan kehumasan Badan Pendapatan Daerah;

b) melakukan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Badan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi tugas Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, serta Penagihan Pajak Daerah I.

Adapun fungsi Bidang Pajak Daerah I meliputi :

- A. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- B. penyediaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- C. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi.

Subbidang Bagian Pajak Daerah I terdiri atas :

- a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I;
- b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah I;
- c. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I.

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I mempunyai tugas :

a) menyiapkan kegiatan penyusunan rencana, kebijakan dan anggaran;

- b) melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib dan penilaian PBB baik secara massal maupun individual.

Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah I mempunyai tugas :

- a) menyiapkan kegiatan dan melaksanakan penghitungan untuk bahan penetapan PBB dan BPHTB;
- b) melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi.

Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah I mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pembukuan, pelaporan dan penyetoran serta menyusun rekapitulasi pemungutan;
- b) menyiapkan kegiatan dan melaksanakan penagihan terhadap piutang Pajak Daerah I dan pemberian pertimbangan terhadap pengajuan angsuran;

4. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi tugas Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, serta Penagihan Pajak Daerah II.

Adapun fungsi Bidang Pajak Daerah II meliputi :

- A. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan;
- B. menjalankan penyusunan data dan informasi;
- C. mengelola keuangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Subbidang Bagian Pajak Daerah II terdiri atas :

- a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;
- b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah II;
- c. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II.

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendapatan Pajak Daerah II mempunyai tugas :

- a) mempersiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b) melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis.

Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah II mempunyai tugas :

- a) menyiapkan kegiatan penerbitan surat ketetapan Pajak Daerah secara jabatan sesuai berita acara penolakan pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang menolak pelaksanaan pemeriksaan;
- b) menyiapkan kegiatan pertimbangan terhadap pengajuan keberatan dan keringanan.

Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah II mempunyai tugas :

- a) melakukan kegiatan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan penyetoran pajak daerah;
- b) menyiapkan kegiatan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah yang dihitung sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan;

5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak

Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi Subbidang Perimbangan, Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Penatausahaan Retribusi.

Adapun fungsi Bidang Pendapatan Bukan Pajak meliputi :

- A. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan;
- B. mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan;
- C. memonitor dan melakukan evaluasi program dan kegiatan;

Subbidang Bagian Pendapatan Daerah Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Subbidang Perimbangan;
- b. Subbidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- c. Subbidang Penatausahaan Retribusi.

Kepala Subbidang Perimbangan mempunyai tugas :

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b) menyiapkan kegiatan penghimpunan dan penyusunan data realisasi penerimaan dana.

Kepala Subbidang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah mempunyai tugas :

- a) menyiapkan kegiatan penghimpunan dan penyusunan data realisasi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b) mengelola dan bertanggung jawab atas teknis keuangan.

Kepala Subbidang Penatausahaan Retribusi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penghimpunan dan penyusunan data realisasi penerimaan;
- b) menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.

6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Penyuluhan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Adapun fungsi Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah meliputi:

- A. pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, penyuluhan dan pelayanan pendapatan daerah, dan sistem informasi pendapatan daerah;
- B. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi;
- C. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan;

b) menyiapkan kegiatan periodik realisasi penerimaan daerah.

Kepala Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

a) mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum bagi wajib pajak dan retribusi Daerah secara langsung dan terpadu dalam satu tempat pelayanan (front office);

b) menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan.

Kepala Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi;

b) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang – undangan.

3.6 Metode Penelitian

Berikut metode penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain :

3.6.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang

akan dibahas penulis yaitu bertempat di Kecamatan Genuk Kelurahan Bangetayu Kulon.

3.6.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

adalah data yang diperoleh dari hasil tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Bapak Wahyu Nur Hidayat, S.E. selaku Kepala Bidang Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah I. Dalam wawancara tersebut ditanyakan hal – hal sebagai berikut :

- a. Faktor ketercapaian Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang tahun 2015 – 2019
- b. Besaran kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang terhadap Pajak Daerah dan PAD tahun 2015 – 2019
- c. Alasan mengapa dapat terjadi kesalahan atas pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi lebih bayar terhadap Wajib Pajak pada Kecamatan Genuk Kelurahan Bangetayu Kulon tersebut
- d. Serta solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap permasalahan ini.

2. Data Sekunder

adalah data pendukung yang digunakan dalam proses pembuatan dan penyusunan Tugas Akhir. Data ini diperoleh dari sumber tempat diadakan penelitian. Data sekunder yang digunakan antara target dan realisasi Pajak

Bumi dan Bangunan tahun 2015 – 2019 (selama empat tahun) Kota Semarang, daftar nilai NJOP Kecamatan Genuk, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang, besaran nilai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 2015 – 2019, Perhitungan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang salah dan yang benar seharusnya dilakukan serta upaya yang dilakukan oleh pihak fiskus.

3.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh penulis menggunakan metode yaitu :

1. Metode Kepustakaan

Adalah metode penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh sumber informasi terkait Pajak Bumi dan Bnagunan Kota Semarang dan diolah kembali. Data diperoleh dari berbagai sumber cetak seperti buku dan sumber – sumber elektronik.

2. Metode Wawancara

Adalah metode dengan melakukan tanya jawab antara penulis dan narasumber terkait permasalahan penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan kepala staf Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah I.

3.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Adalah metode mengelola data berupa angka. Dalam Laporan Praktek

Kerja Lapangan ini beberapa data yang diolah yaitu angka target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2015 – 2019. Dengan menggunakan perhitungan yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas maka akan diketahui persentase atas kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2015 – 2019. Selain itu data yang akan diolah mengenai tingkat ketercapaian PBB Kota Semarang tahun 2015 – 2019 dengan cara :

$$\frac{\text{Target penerimaan PBB Kota Semarang (dalam satu tahun pajak)}}{\text{Realisasi penerimaan PBB Kota Semarang (dalam satu tahun pajak)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas maka akan diketahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang setiap tahun yang ingin dicari, apakah sudah memenuhi target yang diinginkan atau belum tercapai.

Selanjutnya data terakhir yang akan diolah yaitu mengenai perhitungan atas kesalahan PBB terutang Lebih Bayar milik Wajib Pajak bersangkutan yang tinggal di Kecamatan Genuk Kelurahan Bangetayu Kulon sesuai dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Semarang. Dengan tarif sebesar 0,1% dari besaran NJOP Bumi dan Bangunan yang telah diketahui serta solusi yang dilakukan atas permasalahan ini.